

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriatus Shalihah, 2017, Sosiologi Hukum, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Henny Nuraeni, 2016, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Depok: Rajawali Pers.
- Ika D.S Saimima, 2020, Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- I Ketut Mertha, dkk., 2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Indradi Thanos, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia Sebuah Analisa Deskriptif, Jakarta: Bina Niaga Jaya.
- S. Edi Hardum, 2016, Perdagangan Manusia Berkedok Pengiriman TKI, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Viswandoro, Maria Matilda, dkk., 2015, Mengenal Profesi Penegak Hukum, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL HUKUM

- Zulkarnain Hasibuan, 2013, “*Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*”. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 1, No.1. hlm 78-92. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/Justitia.v1i01.%25p>

- Safaruddin Harefa, 2019. “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*”. *University Bengkulu Law Journal*, Vol. 4, No.1, hlm 35-68. DOI: <http://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.
- Aniza A Karunia, 2019, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10, No.1, hlm 115-128. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831>.
- Rizky Karo P., dkk, 2018, “*Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia*”. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol.2, No.2, hlm 1-29. DOI: <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>.
- Yoslan Koni, 2019. “*Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo*”. *Jurnal Kertha Partika*, Vol.41, No.2, hlm 52-66. DOI: <http://doi.org/10.2482/KP.2019.v41.i01.p05>.
- Indah Lestari dan Sri E. Wahyuningsih, 2017. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.3, hlm 601-610.
- Hasaziduhu Moho, 2019, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*”, *Jurnal Penelitian Warta Edisi 59*, hlm 1-13. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Dewi A. Puanandani, 2020, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia*”. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara*, Vol. 14, No.2, hlm 263-276. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.9938>.
- Anggie R.H Putri dan Arifin Ridwan, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*”. *Jurnal Res Judicata*, Vol.2, No.1, hlm 170-185. DOI: <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.
- Toni Y. Rahmanto, 2019, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.19, No.1, hlm 31-52. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>.

Effendi Sekadang, “*Modus Pengangkatan Anak Yang Berimplikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Cahaya Keadilan*”, Vol.6, No.1. hlm 51-72.

Sunggara, Muhammad A., dkk, 2022, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. Jurnal Solusi Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol.20, No.2, hlm 205-222. DOI: <https://doi.org/10.36546//solusi.v20i2.592>.

Yuniantoro, Fredi, 2018, “*Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*”. Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah, Vol.2, No.1, hlm 105-126. DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/Justitia.v2i1.1227>.

C. SKRIPSI DAN TESIS

Kunto Prabowo. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi Tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)*. (Skripsi). Universitas Islam Indonesia. 2007.

Hanafi Rahman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Tesis). Universitas Indonesia. 2012.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3277).

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6141).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

E. INTERNET

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Laporan Akhir Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan, https://www.bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan., Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

Riyanto, Agus. "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?", <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses tanggal 08 Mei 2023 pukul 09.12 WIB.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Official Website, The Crime of Human Trafficking, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021 pukul 07.41 WIB.

Website Resmi Kepolisian Daerah Jawa Timur, <http://jatim.polri.go.id/>, Diakses tanggal 08 Mei 2023 pukul 09.12 WIB.

Website Resmi Provinsi Jawa Timur, <https://jatimprov.go.id/profile>. Diakses pada 23 Oktober 2022 pukul 07.42 WIB.

F. LAIN-LAIN

Wawancara dengan narasumber Komandan Polisi Suratmi, S.H., M.H. Kepala Unit III Asusila Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 25 Nopember 2022 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan narasumber penyidik Pandra,S.H. Unit II Ditreskrimum
Polda Jawa Timur, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 pukul 13.38
WIB.